

SKRIPSI

**KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK TANI
DALAM PRODUKSI KOPI ARABIKA DI KECAMATAN BAROKO
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diusulkan oleh

Salma

Nomor Stambuk : 105641104716



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2020

**KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK TANI
DALAM PRODUKSI KOPI ARABIKA DI KECAMATAN BAROKO
KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Salma

Nomor Stambuk : 105641104716

19/02/2021

1 exp
Smb. Alim

R/0001/IPM/21 CP
SAL
h'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Tani
Dalam Produksi Kopi Arabika Di Kecamatan Baroko
Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Salma

Nomor Stambuk : 105641104716

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Hj. Farmawati, M.Si

Pembimbing II

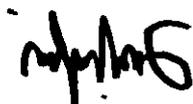


Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat 05 Februari 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

Penguji

1. Ahmad Harakan , S.IP., M.HI (ketua)
2. Hamrun, S.IP., M.Si
3. Nur Khaerah, S.IP., M.IP

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Salma

Nomor Induk Mahasiswa : 105641104716

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Judul : Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Kelompok
Tani dalam Produksi Kopi Arabika di Kecamatan
Baroko Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain, maka gelar yang di peroleh Skripsi ini karenanya batal demi hukum.

Makassar, 02 November 2020

Penulis,



Salma

ABSTRAK

SALMA (2020). Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Tani Dalam Produksi Kopi Aabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang (Dibimbing oleh: Hj Fatmawati dan Ahmad Harakan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang metode penelitian ini menggunakan tipe fenomenologi untuk menemukan makna yang menggali data jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian berdasar pada teori BALOGH DKK yang melihat kolaborasi pemerintah terbagi menjadi 3 proses yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dan dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah informan 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dinamika dalam produksi kopi arabika di kecamatan baroko kabupaten enrekang sudah terlaksana karena melibatkan pihak kelompok tani dan sudah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Balogh dkk bahwa dinamika kolaborasi adalah penggerak penting pada kolaborasi, dimana dalam melaksanakan proses kolaborasi yang baik terdapat dinamika kolaborasi didalamnya dan didalam dinamika kolaborasi terdapat motivasi bersama dan kapasitas untuk melakukan tindakan secara bersama. (2) Tindakan-tindakan kolaborasi dalam produksi kopi arabika di kecamatan baroko kabupaten enrekang dalam kolaborasi produksi kopi arabika sudah maksimal sehingga pada setiap kegiatan pelatihan dan sosialisasi guna meningkatkan kemampuan pihak yang berkolaborasi sudah berjalan dengan lancar. (3) Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi dalam produksi kopi arabika di kecamatan baroko kabupaten enrekang sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh serta membuka lapangan pekerjaan dan peluang pendapatan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pemerintah Daerah, Kelompok Tani

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Kelompok Tani dalam Produksi Kopi Arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Iding dan ibunda Usmi yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tiada henti dan tanpa

pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing I (satu) dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.hi selaku pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang dan Jajarannya, serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis selama proses penelitian berlangsung.
3. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.
5. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si.

6. Teman-teman penulis yang tak hentinya memberi dukungan moril dan mendampingi penulis disegala kondisi.
7. Teman-teman penulis di hot squad khususnya: Irmayani, Hesti inda Lestari, Musfira, Ramlah, Riska, Indah sari, kiki, Nisma, Dilla yang telah memberikan dukungan moril dan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman IP 016 yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah cita-cita mulia. Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak Ira yang selalu menemani saya mulai dari awal bimbingan sampai selesai.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 02 November 2020



Salma

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep Kolaborasi | 11 |
| B. Konsep Pemerintah Daerah | 20 |
| C. Konsep Kelompok Tani | 30 |
| D. Kerangka Fikir | 34 |
| E. Fokus Penelitian | 35 |
| F. Deskripsi Fokus Penelitian | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 37 |

| | |
|---|----|
| B. Jenis dan Tipe Penelitian | 37 |
| C. Sumber Data | 38 |
| D. Informan Penelitian | 39 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| F. Teknik Analisis Data | 40 |
| G. Teknik Pengesahan Data | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Objek Penelitian | 43 |
| B. Inventarisasi dan Data Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang | 56 |
| C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kolaborasi Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Kopi Arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang | 57 |
| D. Pembahasan | 69 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| LAMPIRAN | 77 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Informan | 39 |
| Tabel 4.1 Penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 | 55 |
| Tabel 4.2 Inventarisasi Data | 56 |
| Tabel 4.3 Stakeholder | 57 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir | 35 |
| Gambar 4.1 Peta Kabupaten Enrekang | 54 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian nampaknya masih menjadi primadona perekonomian di Indonesia. Meskipun terjadi pergeseran struktur ekonomi, karena perekonomian negara yang lebih banyak ditopang oleh sektor industri dan jasa, sektor pertanian masih mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja (Badan Intelijen Negara, 2012). Salah satu subsektor pertanian yang berperan besar dalam ekspor produk Indonesia adalah subsektor pertanian. Produk pertanian yang kini menjadi andalan di Indonesia adalah kopi. Sejak 1999, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai penghasil dan pengeksport kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia (AEKI, 2013). Secara komersial, kopi yang diproduksi di Indonesia ada dua jenis, yaitu kopi arabika dan kopi robusta. Tanaman kopi arabika dapat tumbuh dan berbuah secara optimal pada ketinggian lebih dari seribu meter di atas permukaan laut. Sedangkan kopi robusta naik 400-800 meter di atas permukaan laut.

Kopi merupakan komoditas penting dalam perdagangan global yang mencakup banyak negara konsumen dan banyak negara penghasil, diantaranya Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi di dunia menjadikan produksi kopi sebagai sumber devisa negara, pendapatan petani, dan penghasil bahan baku industri. Bisnis penanaman kopi di Indonesia dilakukan oleh perkebunan besar seperti PTPNN, swasta dan juga dari perkebunan rakyat.

Pada tahun 2016, luas lahan kopi di Indonesia diperkirakan mencapai 1.254.921 hektar, sisanya adalah kebun pemerintah (1,77%), dan kebun swasta (2,29%). Dari segi produksi, Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Vietnam. Keadaan ini terjadi karena hasil kopi di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan di Vietnam. Produktivitas kopi yang rendah di Indonesia disebabkan karena sebagian besar ditanam oleh perkebunan rakyat, yang terkendala oleh keterbatasan modal dan akses teknologi yang menyebabkan produk kopi berkualitas buruk.

Saat ini peningkatan produksi kopi di Indonesia masih timpang dan kualitas biji kopinya rendah. Ini karena penanganan pasca panen yang tidak tepat. Oleh karena itu, untuk memperoleh biji kopi yang berkualitas, diperlukan penanganan pascapanen yang tepat dengan melakukan setiap tahapan secara tepat.

Dalam hal ini, yang akan menjadi pembahasan utama adalah kopi yang berasal dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang, tepatnya di kelompok tani To'Beang Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Dimana daerah ini adalah penghasil kopi terbanyak di Kabupaten Enrekang.

Enrekang juga merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang terletak di jantung Semenanjung Sulawesi Selatan dengan kondisi alam berupa daerah pegunungan, menjadikan kawasan seluas sekitar 1.786,01 kilometer persegi ini kaya akan hasil alam sehingga berpotensi untuk mengembangkan agribisnis, seperti kopi dan sayuran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 dalam undang-undang ini berarti: “Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melakukan pertanian yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pendampingan, serta pengembangan sistem dan sarana pemasaran. Produk pertanian, standarisasi dan jaminan luas lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan bagi petani.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kelompok tani harus dilihat sebagai salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan produksi petani kopi. Hal tersebut dapat dicapai melalui kerjasama berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, sehingga efektifitasnya besar dalam meningkatkan produksi produktif sektor pertanian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan kerjasama dengan masyarakat tani adalah dengan membentuk kelompok tani. Hal ini serupa dengan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dan khususnya pada Kelompok Tani To'Beang yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani, sehingga sangat bergantung pada hasil pertanian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Adanya kelompok tani yang dibentuk dan diluncurkan oleh masyarakat sendiri tentunya tidak lain merupakan wadah untuk berdiskusi dan bertukar pikiran antar petani. Dengan cara ini, pemecahan masalah yang terjadi dalam proses pertanian dapat dicari bersama sehingga menjadi lebih ringan dalam menanganinya.

Dilihat dari peningkatan produksi dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 mencapai \pm 450 ton, dan pada tahun 2019 mencapai \pm 550 ton, dan pada tahun 2020 masih berproduksi. Peningkatan produksi masyarakat pertanian tidak lepas dari adanya kelompok tani didalamnya. Kelompok tani sebagai pendukung kegiatan utama petani tentunya memiliki dinamika masing-masing, seperti permasalahan yang terkait dengan kegiatan pertanian. Fakta yang dihadapi peneliti di lapangan adalah permasalahan internal dan eksternal yang menghambat kegiatannya. Masalah internal tersebut berupa permodalan, sarana produksi, keterampilan, pengetahuan, mentalitas, dan motivasi. Masalah eksternal termasuk kebijakan pemerintah dan masalah global. Tentu saja, adanya masalah-masalah tersebut menyebabkan hasil dan produksi yang lebih rendah. Rendahnya hasil panen yang terjadi secara nasional selama ini disebabkan kurangnya alat mesin pertanian, selain itu petani juga menggunakan alat tradisional untuk mengurangi dan memperlambat produksi.

Oleh karena itu, kerjasama pemerintah pertanian daerah berperan penting dalam memberikan pendampingan alat-alat pengolahan kopi yang baik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pertanian sehingga dapat memaksimalkan proses pengolahan kopi dan produksi kopi akan memberikan hasil yang lebih optimal. Sektor pertanian pada masyarakat pedesaan memegang peranan yang sangat penting karena merupakan sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk desa. Sejak dulu, proporsi terbesar kesempatan kerja di Indonesia ada di sektor pertanian. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkemauan dan mampu mengelola pertanian di pedesaan

masih banyak terdapat karena pertanian merupakan tempat kerja utama keluarga di pedesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia paling banyak bekerja di sector pertanian pada tahun 2017. Penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 39,68 juta orang atau 31,86 persen dari total penduduk yang bekerja sebesar 124,54 juta orang menurut Kepala BPS Suhariyanto.

Kebanyakan orang di komunitas pedesaan bergantung pada hasil panen yang mereka dapatkan. Untuk memiliki pendapatan yang memadai dan salah satu cara yang dapat dicapai adalah melalui organisasi petani kolektif yang benar-benar dapat meningkatkan hasil produksi bagi petani. Organisasi kelompok tani ini dapat digunakan sebagai wadah untuk berdiskusi dengan para petani untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi dan untuk dapat mencari cara-cara penyelesaian masalah dengan bekerja sama dengan pemerintah melalui pendampingan sesuai dengan kebutuhan petani. Potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam (SDA) belum sepenuhnya dikembangkan dan dimampukan oleh petani. Kerja sama mereka akan sangat bermanfaat bagi petani, karena dengan sumber daya manusia yang unggul dapat memberikan pengetahuan baru kepada petani itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri untuk menggunakan tenaga yang dimiliki, antara lain melalui transfer tenaga dari lingkungan.

Pemberdayaan petani harus dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas internal petani serta membuka lebih banyak akses dan peluang bagi

petani untuk memperoleh dukungan sumber daya produktif dan mengembangkan usaha yang mampu menyejahterakan masyarakat Pendidikan dan pemahaman pertanian merupakan agenda operasional yang sangat penting, dan pertumbuhan pertanian tidak dapat berjalan dengan baik. Yang dicitakan bangsa Indonesia karena berbagai permasalahan yang mereka hadapi dari waktu ke waktu. Permasalahan tersebut antara lain masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kapasitas masyarakat, sehingga diperlukan peran pemerintah, dan dalam hal ini dibentuk kelompok tani, dari kelompok tani tersebut, dan masyarakat petani nantinya akan diberdayakan sehingga produktivitasnya lebih efektif dan efisien.

Pelatihan peningkatan produksi melalui kelompok tani tidak lain merupakan upaya untuk mempercepat tujuan. Banyak petani yang tersebar di pedesaan, sehingga dalam pelatihan kelompok diharapkan akan tercipta kesamaan visi antar kelompok tani dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam usaha pertaniannya. Tujuan dibentuknya kelompok tani ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas petani dan keluarganya sebagai subyek pembangunan pertanian melalui pendekatan kolektif untuk berperan lebih besar dalam pembangunan. Kelompok tani adalah salah satu bentuk persatuan petani yang berperan sebagai penyuluhan dan diharapkan dapat lebih fokus pada perubahan kegiatan pertanian menjadi lebih baik.

Ada beberapa kelompok tani di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang seperti Kelompok Tani Sari Kembang, Kelompok Tani Sinar Buntu

Dama, Kelompok Tani To'Beang. Akan tetapi karena pengaruh dari adanya COVID-19 sehingga masyarakat dilarang untuk memasuki setiap kelompok tani. Jumlah anggota di setiap kelompok tani minimal 20 anggota. Adapun kelompok tani yang bisa memberikan izin sebagai tempat penelitian saya yaitu salah satu kelompok tani yang diberi nama Kelompok Tani To,Beang dimana kelompok tani ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengolah hasil panen sendiri seperti mengolah buah kopi menjadi bubuk kopi, dan sebagian masyarakat bergantung dari hasil produksi bubuk kopi.

Akan tetapi tidak semua masyarakat paham akan cara pengolahannya begitupun dengan penggunaan alat yang di berikan pemerintah, dilihat dari observasi sebelumnya pemerintah kurang memberikan sentuhan langsung kepada masyarakat seperti penyuluhan terkait tata cara mengolah kopi dengan baik, untuk memberikan pemahaman terkait cara pengolahan kopi dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi salah satu pertimbangan atau alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai "Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kelompok Tani dalam Produksi Kopi Arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang". Pada penulisan skripsi ini, penulis mencoba mencari informasi tentang kerjasama antara pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam produksi Kopi arabika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan diatas, peneliti dapat memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika kolaborasi dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana tindakan-tindakan kolaborasi dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui dinamika kolaborasi dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui tindakan-tindakan kolaborasi dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.
3. Untuk mengetahui dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pembandingan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mencari lokasi penelitian serupa dan menambah khasanah perpustakaan bagi yang membutuhkan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sumbangsi pemikiran dalam upaya mewujudkan kolaborasi dalam produksi kopi arabika dan tentunya bagi kelompok penanam kopi Kabupaten Enrekang, khususnya dalam produksi kopi arabika kedepannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitiannya yaitu:

Penelitian oleh Muhlis (2019) yang berjudul “Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan PT. Astra Argo Lestari dalam Meningkatkan Produksi Kelapa Sawit Rakyat di Mamuju Tengah” dimana hasil penelitian ini menunjukkan adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Daerah setempat. PT Astra Agro Lestari dengan kegiatan dan strategi yang dilakukan adalah melakukan pelatihan pasca panen dan penanganan perkebunan kelapa sawit.

Penelitian oleh Ira Ferianti (2018) sudah pernah dilakukan dalam penelitian berjudul “Memberdayakan Masyarakat Tani untuk Meningkatkan Panen Beras Melalui Program Kelompok Tani”, yang menggambarkan bahwa melaksanakan pemberdayaan masyarakat Keputusan untuk meningkatkan hasil padi pada kelompok tani sumber sari diketahui bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok tani sari. Anggota kelompok tani kemudian menjadi lebih berdaya karena kemampuan dan

ketrampilan yang dimiliki oleh petugas PPL melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan.

B. Konsep Kolaborasi

1. Pengertian Kolaborasi

Secara kognitif, kata kerjasama berasal dari bahasa Inggris yang artinya "*co-labor*" yang artinya kerjasama. Kata 'kerjasama' mulai digunakan pada abad kesembilan belas ketika industrialisasi mulai berkembang, dan organisasi pada saat itu menjadi semakin kompleks. Divisi-divisi mulai membuat struktur organisasi pembagian tugas dari angkatan kerja organisasi. Kompleksitas organisasi merupakan titik awal kerjasama dalam berbagai organisasi (Wanna, 2008: 3).

Secara filosofis kerjasama merupakan upaya berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi adalah kerja sama yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara dua pihak (kolektif) atau lebih, terutama dalam upaya memadukan gagasan dalam rangka pencapaian tujuan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian kerjasama sebagai jaringan atau penyaluran informasi, sumber daya, kegiatan, dan kapabilitas organisasi pada dua atau lebih sektor untuk bekerja sama mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan bekerja sendiri.

Menurut pendapat Grey dalam (Fendt, 2010: 19), yang menyatakan bahwa kolaborasi adalah sebuah proses ada kesadaran dari berbagai pihak yang memiliki keterbatasan dalam melihat sesuatu permasalahan untuk kemudian mencoba mengeksplorasi perbedaan tersebut untuk mencari solusi.

Menurut (Fendt, 2010: 22), ada tiga alasan organisasi untuk berkolaborasi, yaitu:

- a. Sebuah Organisasi membutuhkan kerja sama karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu sendiri tanpa bantuan pihak lain.
- b. Melalui kolaborasi, manfaat yang akan didapat organisasi bisa lebih besar jika dibandingkan dengan pekerjaan individu.
- c. Melalui kerja sama, perusahaan dapat menekan biaya produksi agar produknya murah dan memiliki daya saing di pasar.

Menurut (Sabaruddin, 2015: 25) kerjasama yang dianjurkan adalah kerjasama antar organisasi atau antar lembaga untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai atau dilakukan secara mandiri, dan istilah kerjasama dan kerjasama masih digunakan secara bergantian. Dua periode harus disetujui.

Pada hakikatnya kerjasama dikenal hanya kerjasama dengan para pelaku baik kelompok maupun individu sebagai bentuk komitmen dalam bekerja, kesamaan visi, misi dan tujuan yang harus dicapai bersama yang menyulitkan pencapaian jika masing-masing pelaku bekerja secara individu maupun personal.

Menurut (Balogh, Kirk, Nabatchi, Tina, 2012), juga melihat *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dalam manajemen dan perumusan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Proses ini dilaksanakan dengan cara melibatkan aktor-aktor dari berbagai level untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan secara kolektif guna tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan (Nahrudin, 2018).

Menurut Anne-Marie Thompson dalam bukunya (Pramusinti, Agus, 2009: 115), kerjasama menunjukkan bahwa konsepnya mirip dengan kerjasama tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yaitu proses kolektif dalam pembentukan suatu kesatuan yang didasarkan pada hubungan yang saling menguntungkan (timbang balik) dan adanya tujuan bersama dari organisasi independen atau individu yang berinteraksi. Dengan satu sama lain melalui negosiasi formal dan informal.

Sink (dalam Zaenuri 2001: 5) menjelaskan bahwa kerjasama kolaboratif adalah suatu proses dimana organisasi yang mempunyai kepentingan pada suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang didefinisikan secara kolektif untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika dilaksanakan secara individual. Hal ini didukung oleh pendapat para filer (dalam Zaenuri 2001) yang lebih spesifik menjabarkan tentang kolaborasi kolaboratif yang melibatkan kerjasama yang intens antar pihak, termasuk upaya sadar untuk menentukan tujuan, strategi, agenda, sumber daya, dan kegiatan. Kedua lembaga yang pada dasarnya memiliki tujuan berbeda membangun kesamaan visi dan berusaha mencapainya bersama dengan visi yang sama, masing-masing komponen memungkinkan untuk berpartisipasi dalam urusan yang disepakati bersama. Ini adalah konsep kolaboratif yang memungkinkan kerjasama antara ketiga pilar tersebut karena diyakini ada kesamaan visi, akan menumbuhkan partisipasi yang tinggi di sektor non-pemerintah. Sektor publik dan swasta memiliki ruang

yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan publik.

Sebagian besar pemerintah telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Akan tetapi kerjasama yang dibangun hanya sebatas konvensional, yaitu sebatas pada kerjasama antara pemerintah sebagai pemilik pekerjaan dan lembaga swasta sebagai kontraktor. Kerjasama ini tidak lebih dari transaksi jual beli barang dan jasa antara pemerintah dan pihak swasta. Kerjasama yang bersifat jangka pendek dengan intensitas hubungan yang terbatas, sebagaimana diatur dalam kontrak. Kemanfaatan kerjasama dihitung sebagai kompensasi atau prestasi dan resiko ditanggung oleh masing-masing pihak. Kalau dilihat dari pola kerjasama tersebut kelihatannya sudah ada kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah namun kenyataannya belum ada.

Hal ini senada dengan yang dijelaskan (Dwiyanto, 2015: 253) yang mengatakan bahwa kerjasama koperasi dari masing-masing organisasi terikat oleh adanya kepentingan bersama untuk mencari solusi atas suatu masalah atau isu tertentu yang dirasakan kedua belah pihak karena sangat mengganggu kepentingannya. Keinginan untuk bekerjasama dalam kerjasama muncul karena keinginan untuk mencari solusi atas masalah yang dimiliki organisasi publik dengan organisasi mitranya di sektor swasta. Permasalahan atau perhatian bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk mengembangkan kerjasama antara organisasi publik dengan organisasi mitra di sektor swasta.

Pengertian kerjasama juga dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu kerjasama dalam pengertian proses dan kerjasama dalam pengertian standar. Kerja sama dalam arti proses adalah rangkaian proses atau cara pengorganisasian / pengelolaannya secara kelembagaan, artinya sejumlah lembaga pemerintah dan nonpemerintah berperan serta sesuai dengan kepentingan dan tujuannya, yang biasanya terdiri atas lembaga pemerintah, lembaga sosial saja, atau pihak swasta. Sedangkan kerjasama dalam arti normatif merupakan ambisi atau tujuan filosofis pemerintah untuk mencapai interaksinya dengan aktor atau mitra (Wajaya, 2015).

Pemerintah harus lebih memahami kerjasama sebagai kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, karena masing-masing berusaha menginisiasi dan menyatukan visi untuk menyatukan tujuan, strategi dan kegiatan guna mencapai tujuan bersama. Namun, masing-masing pihak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen. Hubungan yang dibangun dengan masyarakat merupakan hubungan kerjasama, dan hubungan inti antar agen tidak akan berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara pengelola dan pengelola (Dwiyanto, 2015).

Pihak yang bekerja sama adalah prinsipal dan bertindak sebagai agen bagi dirinya sendiri. Kemitraan melibatkan dua pihak untuk berbagi sumber daya, risiko, tanggung jawab, dan manfaat. Sifat kemitraan seperti ini menjadikan kerja sama berorientasi pada kepentingan jangka panjang

karena melanjutkan fleksibilitas dan interaksi yang tinggi antara kedua belah pihak.

Beberapa pengertian kolaborasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kolaborasi merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa actor baik dari pihak sector public maupun dari pihak sector privat serta masyarakat yang turut melibatkan diri dalam kerjasama yang sifatnya kolaborasi, pada dasarnya kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta dengan masyarakat masih mencirikan kemitraan sehingga dari pengertian kolaborasi yang dikemukakan masih bersifat umum karena para ahli mengemukakan dengan menggunakan pandangan yang berbeda-beda. Akan tetapi dari pengertian kolaborasi di atas bahwa telah ditegaskan adanya kerjasama yang bersifat dinamis dan saling ketergantungan (interdependent).

2. Collaborative Governance

Pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas internalnya untuk melaksanakan kebijakan dan melaksanakan program. Keterbatasan kapasitas, sumber daya, dan jaringan yang mendukung faktor-faktor pendukung pelaksanaan suatu program atau kebijakan pemerintah mendorong kerjasama dalam mencapai tujuan program atau kebijakan (Purwanti, 2016: 174).

Menurut (Ansell, 2007: 534) disebutkan bahwa pemerintahan kolaboratif merupakan strategi baru dalam pengelolaan pemerintahan yang mempertemukan para pembuat kebijakan yang berbeda dalam forum yang

sama untuk mencapai kesepakatan bersama. Lebih lanjut, Ansell dan Gash mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-negara dalam proses pembuatan kebijakan kolektif dan formal, berorientasi konsensus, dan konsultasi dengan tujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik, dan mengelola program atau aset. masyarakat.

Tata kelola kolaboratif adalah alat yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, dan tata kelola koperasi adalah alat yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, karena tata kelola koperasi menciptakan kepemilikan bersama atas masalah tersebut. Aktor yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat suatu masalah, tidak mudah untuk menciptakan pemahaman antar peran seorang aktor. Collaborative governance berperan sebagai mediator agar para pelaku dapat menempa pemahaman yang sama tentang masalah (C.Ansell, 2014: 172)

Tata kelola kolaboratif juga dapat menggambarkan keadaan aktor yang saling berhubungan. Keinginan untuk melakukan tata kelola kolaboratif muncul karena para aktor memahami batasan mereka. Setelah itu, para aktor tersebut harus mengungkapkan keinginan dan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan aktor lainnya. Setiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi aktor lainnya. Setelah aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, sangat penting untuk membangun rasa kepemilikan bersama dari setiap kolaborasi (C. Ansell, 2014: 178). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola

kolaboratif adalah proses penataan jaringan multi sektoral dan multi organisasi (tata kelola, swasta, dan masyarakat sipil) yang membentuk kesepakatan bersama, keputusan bersama, mencapai konsensus melalui interaksi formal dan informal, menetapkan dan mengembangkan standar. . Aturan dalam interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dalam kerjasama interaktif yang terkesan sederajat, yakni semua aktor memiliki posisi yang sama.

Menurut (Balogh, Kirk, Nabatchi, Tina, 2012: 02) menjelaskan bahwa tata kelola koperasi merupakan suatu proses dan struktur pengambilan keputusan dalam kebijakan dan penyelenggaraan publik yang melibatkan aktor-aktor yang datang secara konstruktif dari berbagai tingkatan, baik di tingkat pemerintahan dan / atau badan publik. Dan lembaga swasta dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan umum yang tidak dapat dicapai jika hanya satu pihak yang melaksanakannya. Dimana tiga proses dalam tata kelola kolaboratif adalah a) dinamika kerjasama, b) aksi kolaboratif, dan c) pengaruh dan adaptasi dari proses kerjasama (Balogh, Kirk, Nabache, Tina, 2012)

O'Leary Bingham dan Gerard (Balogh, Kirk, Nabatchi, Tina, 2012: 02) mendefenisikan bahwa *collaborative governance* merupakan sarana untuk mengendalikan proses yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam sector swasta public dan masyarakat.

3. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi menunjukkan sebuah system yang dimana kolaborasi mewakili model yang mendominasi untuk perilaku, pengambilan keputusan dan aktivitas. Dalam proses kolaborasi ini memiliki tiga variable. Dimana dalam proses kolaborasi yang perlu diperhatikan antara lain yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi serta dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi (Balogh, Kirk, Nabatchi, Tina, 2012).

- a) Dinamika kolaborasi adalah penggerak penting dalam proses kolaborasi dan memiliki sifat yang berubah. Kerja sama yang baik memiliki dinamika. Dinamika kerjasama menitikberatkan pada prinsip partisipasi, motivasi bersama dan kemampuan bekerjasama.
- b) Tindakan koperasi adalah tindakan yang dilakukan dalam proses koperasi, seperti tata cara pembinaan proses dan kegiatan koperasi di lapangan untuk membantu produksi yang terdiri dari fasilitasi dan pemajuan proses koperasi.
- c) Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi merupakan dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi dalam proses kolaborasi.

4. Manfaat dan Tujuan Kolaborasi

Berikut ini beberapa manfaat dan tujuan kolaborasi menurut M. Fatwadi 2015 antara lain:

- a. Menyediakan layanan atau bisnis berkualitas tinggi dengan menggabungkan keterampilan profesional yang unik;
- b. Memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi sumber daya;
- c. Peningkatan profesionalisme, loyalitas dan kepuasan kerja;
- d. Tingkatkan kohesi di antara mereka yang berpartisipasi di dalamnya;
- e. Memberikan kejelasan peran dalam interaksi antar aktor yang terlibat di dalamnya.

Tujuan kerjasama adalah:

- a. Menyelesaikan masalah;
- b. Ciptakan sesuatu
- c. Temukan sesuatu di blok.

C. Konsep Pemerintah Daerah

Istilah pemerintah daerah berasal dari kata pemerintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam kata secara tersirat terdapat beberapa unsur berbeda dari kata "perintah", artinya kewajiban untuk menunjukkan komitmen melaksanakan apa yang diminta. Ada yang memberi dan menerima perintah. Ada hubungan fungsional antara keduanya.

Istilah kepemimpinan, pemerintahan dan pemerintah memiliki arti yang berbeda-beda. Perintah adalah kata-kata yang berarti melakukan sesuatu secara akurat. Pemerintah adalah badan atau organisasi yang menjalankan kewenangan pemerintahan dan pemerintahan adalah tindakan, cara, atau urusan direksi.

Secara ilmiah pengertian pemerintah dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pemerintah sebagai instrumen (organ) negara yang menjalankan tugasnya, dan pemerintah sebagai fungsi pemerintahan. Bisa juga dibedakan antara istilah pemerintah dalam arti alat antara pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh otoritas eksekutif sedangkan pemerintah dalam arti luas berarti seluruh organ negara dan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintah yang berkepentingan di tingkat kabupaten atau kabupaten / kota mampu melaksanakan pemerintahan yang sebaik mungkin berorientasi pada kualitas pelayanan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat sebagai bagian yang tidak lepas dari kewajiban masing-masing kabupaten. Hal ini dijelaskan oleh Nawawi (2003) yang memaknai pemerintah daerah sebagai badan hukum atau lembaga milik umum yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan berbagai upaya dan tindakan guna mencapai tujuan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah dapat diartikan sebagai lembaga atau institusi resmi yang memiliki kewenangan untuk mengelolah berbagai bentuk kebutuhan masyarakat di suatu daerah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan maupun penyelenggaraan pembanguana secara berkelanjutan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah

merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat yang bertugas untuk mengurus berbagai persoalan-persoalan ekonomi dan social di tengah-tengah masyarakat dengan mengedepankan semangat musyawarah.

Dalam pandangan Wedajja, peraturan penyelenggaraan pemerintahan tentu saja memiliki satu ketentuan atau pedoman dasar, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dan tertuang dalam Pasal 18 amandemen UUD 1945 tahun 2002, yang mana terdapat 7 (tujuh) ayat, antara lain:

- a) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi dan kabupaten (Ruvince dibagi menjadi kabupaten dan kota,
- b) Setiap provinsi, provinsi dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- c) Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah ekonomi dan fungsi pembantuan.
- d) Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- e) Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing dipilih secara demokratis sebagai kepala daerah, perwalian dan pemerintahan kota.

- f) Pemerintah daerah menikmati otonomi sebesar-besarnya, kecuali urusan pemerintahan yang menurut undang-undang adalah urusan pemerintah pusat.
- g) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk penyelenggaraan pemerintahan sendiri dan pemerintahan bersama.
- h) Undang-undang mengatur tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, hubungan antara pemerintah Busan dan pemerintah provinsi diatur dalam Pasal 18A UUD 1945 yang juga telah diubah dan terdiri dari (dua ayat), antara lain:

- a. Sebuah. Hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan daerah.
- b. Kota diatur oleh undang-undang, dengan mempertimbangkan kekhasan dan keragaman daerah.
- c. Hubungan keuangan, pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan konsisten berdasarkan undang-undang (amandemen UUD 1945 tahun 2002).

Pembentukan pemerintah daerah sesuai amanat yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan bagi berbagai peraturan perundang-undangan dan produk legislasi yang mengatur pemerintahan daerah. Siswanto

Sunano (2008: 54) menjelaskan bahwa undang-undang tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tujuan utama pembentukan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta sebagai sarana pendidikan politik di tingkat daerah. Menurut Suhady (Tjanra, W, 2009: 197), menurut definisi, pemerintah adalah pengarah dan pengelolaan yang berwenang atas kegiatan masyarakat di suatu negara, kota, dll. Pemerintah juga diartikan sebagai badan pengatur suatu bangsa, negara bagian, kota dll. Pengertian pemerintahan dilihat dari sifatnya yaitu pemerintahan dalam arti luas yang mencakup semua kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit hanya mencakup kekuasaan eksekutif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan asas pemerintahan sendiri dan pemerintahan bersama serta asas swadaya seluas mungkin dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas kemandirian dan fungsi pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, atau walikota, dan badan provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini, peran pemerintah daerah adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam bentuk langkah-langkah yang baik dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai komponen penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengelola wilayahnya dengan baik sekaligus bertanggung jawab penuh dan menjauhi praktik korupsi. Berkenaan dengan kewajiban pemerintah daerah yaitu: a) melindungi masyarakat dan menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan bangsa, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, c) mengembangkan kehidupan demokrasi, d) mewujudkan keadilan dan pemerataan, e) meningkatkan pelayanan Pendidikan dasar, f) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, f) penyediaan fasilitas sosial dan umum yang memadai, h) pengembangan sistem jaminan sosial, l) penyusunan tata ruang dan tata ruang, j) pengembangan sumber daya produktif di daerah, k) pelestarian lingkungan, l) pengelolaan Pengelolaan

kependudukan, m) menjaga nilai-nilai sosial budaya, n) merumuskan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Komitmen daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana aksi pemerintah daerah dan dijabarkan ke dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan prinsip pemerintahan, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, taat dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah agar otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah terdiri dari gubernur, wali, dan walikota yang dibantu oleh adanya layanan yang memiliki peran sentral dalam pemerintahan. Menurut Kaho, dalam bukunya *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*, meskipun dinas daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi pokok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhitungkan pro dan kontra, namun dalam batasan tertentu dapat dimanfaatkan dan berperan sebagai organisasi ekonomi pemberi pelayanan. Di samping itu. Dari sini kabupaten bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Kahoo, 2002: 173-174).

Menurut UU No. 2004/32, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten dan kota. Daerah yang ada dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas pemerintahan sendiri dan misi

bantuan. Pemerintah provinsi dan kabupaten adalah DPRD serta pemerintah daerah kabupaten / kota yang terdiri dari pemerintah daerah / kabupaten / kota dan DPRD kabupaten / kota. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan badan daerah.

Peran pemerintah merupakan kebutuhan mutlak dalam setiap organisasi pemerintah dan swasta, dan merupakan salah satu fungsi utama yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin.

Peran pemerintah daerah dalam desentralisasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi beban karena aparat pemerintah pusat tidak perlu lagi beranjak dari daerah dimana perangkat daerah berfungsi dengan baik.
- 2) Generalisasi berkembang, karena semua lapisan masyarakat dikembangkan dengan segala macam kemampuan.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparat pemerintah daerah, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan bekerja.
- 4) Menambah jumlah DPRD, karena desentralisasi adalah demokrasi di daerah.
- 5) Masyarakat berperan serta di wilayahnya, karena mereka melihat bahwa setiap karya yang dihasilkan setiap karyawan digunakan untuk negaranya.

Menurut UU No. 32/2004, Pasal 217, dalam rangka penyelenggaraan peran pemerintah, pemerintahan daerah dikembangkan oleh pemerintah yang meliputi:

- a. Koordinasi pemerintahan dari struktur pemerintahan.
- b. Memberikan kontrol dan standar untuk melaksanakan urusan pemerintahan.
- c. Memberikan bimbingan, pengawasan dan nasehat atas penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- d. Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Merencanakan, meneliti, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Berdasarkan Bupati Enrekang Nomor 52 Tahun 2016 terkait dengan jabatan, tugas pokok, tugas, dan tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang, Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang menyerahkan dan mengambil alih wali amanat melalui sekretaris daerah. Tugas pokok dan fungsi yang diindikasikan yaitu kepala bidang pertanian mempunyai tugas melaksanakan arahan dan penyusunan regulasi di bidang pertanian. Untuk melakukan tugas pokoknya tersebut. Sektor pertanian melakukan tugas-tugas berikut:

- a. Penyediaan kegiatan pembenihan dan perlindungan tambak;
- b. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan produksi usahatani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan sarana dan prasarana pertanian.

D. Konsep Kelompok Tani

Kelompok Tani adalah organisasi tingkat petani yang dibentuk untuk mengorganisir petani dalam bidang pertanian (Hermanto, 2007). Kelompok tani juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengarahan Kelompok Tani dan Perkumpulan Kelompok Tani yang mendefinisikan bahwa “Kelompok Tani adalah kelompok tani / pemulia / tani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, dan kesamaan kondisi lingkungan sosial ekonomi serta sumber daya, komoditas yang sama, dan keakraban dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Dalam kelompok tani terdapat anggota kelompok tani yang disebut sebagai pelaku utama dan pelaku niaga, dan pelaku utamanya adalah mereka yang melakukan usaha tani pangan, hortikultura, usahatani, dan peternakan. Sedangkan perwakilan komersial adalah setiap orang yang melakukan usaha agar mau dan mampu membantu dan mengatur diri sendiri dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya guna meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam kehidupan pelestarian lingkungan.

Kelompok tani didefinisikan sebagai kelompok tani atau tani yang terdiri dari petani dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, yang secara informal berkomitmen pada suatu wilayah kolektif atas dasar kerukunan dan saling membutuhkan serta berada dalam lingkup pengaruh dan kepemimpinan suatu kelompok tani. Kelompok tani adalah suatu lembaga yang mempersatukan petani secara horizontal dan dapat dibentuk menjadi beberapa

lembaga keuangan, lembaga pemasaran, penyedia sarana produksi pertanian dan sumber informasi (Saptana et al; 2004).

- a. Pekerjaan kelompok tani juga diatur di Permentan No. 82 tahun 2013, yaitu:
- b. Learning Lessons, yaitu Kelompok Tani sebagai wadah pendidikan dan pendidikan bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi pertanian mandiri untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kehidupan yang lebih baik;
- c. Forum kerjasama: Kelompok tani adalah wadah untuk mempromosikan kerjasama antar petani didalam poktan dan antar poktan dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan mampu menjadikan pertanian lebih efisien, mampu menghadapi ancaman, tantangan, kendala dan keresahan serta lebih menguntungkan;
- d. Unit produksi: seluruh usahatani yang dilakukan oleh setiap anggota poktan harus dilihat sebagai unit usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi komersial, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.
- e. Kelompok tani dibesarkan dari, oleh dan untuk mereka dengan jumlah 20-25 orang petani atau disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar (Menteri Pertanian). Pengurus anggota kelompok tani paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan departemen sesuai kebutuhan. Sebagai penentu keberlangsungan pertumbuhan kelompok

tani, perlu disusun rencana aksi bersama. Kemudian tentang peningkatan kapasitas kelompok tani dalam mengembangkan agribisnis (Permentan No. 82 tahun 2013), maka:

- f. Menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga petani dapat membentuk dan mengembangkan kelompok secara partisipatif;
- g. Mendorong kreativitas dan inisiatif anggota kelompok tani untuk memanfaatkan setiap kesempatan kerja, informasi dan akses permodalan yang tersedia;
- h. Membantu menyederhanakan proses, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah, serta merencanakan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi di bidang pertanian;
- i. Meningkatkan kemampuan menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi dan sumber daya daerah untuk mengembangkan barang yang dikembangkan / dibudidayakan guna memberikan manfaat usaha yang optimal;
- j. Meningkatkan kapasitas anggota untuk mampu mengelola usahatani secara komersial, berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- k. Meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi komersial masing-masing anggota untuk menjadi unit usaha yang menjamin permintaan pasar yang dibuktikan dengan kuantitas, kualitas dan kontinuitas.
- l. Mengembangkan kemampuan anggota untuk menciptakan teknologi khusus kawasan;

- m. Dorongan dan advokasi agar petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan pinjam untuk memfasilitasi pengembangan modal komersial bagi kelompok tani.

E. Kerangka Fikir

Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam mengembangkan berbagai konsep teori yang digunakan dalam penelitian dan hubungannya dengan rumusan masalah.

Mengacu pada konsep kerjasama, kerjasama ini merupakan upaya mempertemukan semua sektor baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mengelola, mengatur dan mengatur segala urusan bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien. Dari uraian di atas, maka tulisan ini akan memaparkan kerjasama antara pemerintah daerah dan kelompok tani To'Beang dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang. Produksi ini meliputi Kementerian Pertanian dan kelompok tani masyarakat. Ada tiga proses dalam tata kelola kolaborasi, yaitu: a) Dinamika Kolaborasi, b) Tindakan Kolaborasi, dan c) Dampak dan Adaptasi terhadap Proses Kolaborasi (Balogh, Kirk, Nabache, Tina, 2012).

Berdasarkan latar belakang dan teori di atas, maka kerangka penelitian ini dapat dijelaskan dalam diagram berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir



F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah kerjasama dalam meningkatkan produksi kopi arabika di Kelompok Tani To'Beang Kecamatan Baroko Kabupaten Enreang, dengan tiga indikator utama yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi focus penelitian guna memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian maka deskripsi focus penelitian ini adalah proses pengelolaan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dinas pertanian

dengan kelompok tani dalam produksi kopi arabika, dengan tiga indikator utama yaitu:

1. Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi dan memiliki sifat yang berubah-ubah. Kolaborasi yang baik terdapat dinamika. Didalam dinamika kolaborasi berfokus pada keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.
2. Tindakan-tindakan kolaborasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam proses kolaborasi seperti tindakan memajukan proses kolaborasi dan kegiatan dilapangan guna membantu dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.
3. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi merupakan dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi dalam proses kolaborasi dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 2 (dua) bulan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dengan mengangkat tema kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam produksi kopi arabika maka sangat relevan menjadikan kelompok tani sebagai subjek penelitian khususnya kelompok tani *To'beang*.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dengan melakukan pengamatan yang lebih seksama, mencakup deskriptif dalam konteks yang mendetail dengan disertai catatan hasil wawancara dan analisis dokumen yang mendukung penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti

menyangkut tentang kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2012: 137) data primer sebagai berikut:

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.” Menggunakan data primer karena berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2012: 137) Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang diolah oleh pihak lain, yaitu informasi mengenai data-data terkait dengan kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam meningkatkan hasil produksi kopi melalui berbagai literatur situs internet dan catatan apapun yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Informan Penelitian

Maelong (2006: 12), kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau dalam informan ini memerlukan informan yang mempunyai pengetahuan tentang masalah penelitian yang akan diteliti guna memperoleh data dan informasi yang akurat. Oleh sebab itu informan yang diwawancarai dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

| NO | INFORMAN PENELITIAN | JUMLAH |
|----|------------------------------|---------|
| 1 | Kepala Dinas Pertanian | 1 orang |
| 2 | Kabid Perkebunan | 1 orang |
| 3 | Ketua Kelompok Tani To'Beang | 1 orang |
| 4 | Petani kopi | 4 orang |

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi)

Pada metode ini, penelitian akan melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan alat indera (penglihatan dan pendengaran) terhadap gejala dan masalah yang terjadi.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada para informan yang menjadi obyek dari penelitian ini.

Peneliti akan mengadakan pertemuan secara langsung terhadap informan dengan menggunakan wawancara bebas. Artinya bahwa peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada para informan sesuai dengan konsep pertanyaan yang sudah tersedia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi data-data yang dianggap dapat menunjang dalam penelitian ini. Adapun dokumentasi dapat berupa catatan, arsip, dan foto atau gambar lokasi penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dengan maksud untuk memperjelas dan mendukung data-data penelitian penulis.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini didasarkan atas penjelasan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012: 246), yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah tindakan memilih dan memilah data-data yang sesuai dengan objek penelitian melalui perangkuman, memilih data-data pokok, dan memfokuskan pada sesuatu yang dianggap perlu, menemukan pola dan temanya serta membuang hal-hal yang tidak penting.

2. Sajian Data (*display data*)

Data yang didapatkan akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan menjelaskan hubungan masing-masing kategori dan melampirkan dalam sebuah bagan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara sampai ditemukannya data dan bukti yang lebih valid untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

G. Teknik Pengesahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2012: 125) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut (Sugiyono, 2012: 127) membagi triangulasi ke dalam tiga macam yaitu;

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara $3^{\circ} 14'36''$ - $3^{\circ}50'00''$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ} 40'53''$ - $120^{\circ} 6'33''$ Bujur Timur. Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung jajah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

b. Kondisi Topografi

Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah

lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November - Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus - Oktober.

Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun level desa/kelurahan. Pada Tahun 1995 di Kabupaten Enrekang hanya terdapat 54 desa/kelurahan yang tersebar pada 5 kecamatan. Dengan adanya perubahan situasi dan kondisi wilayah, maka pemekaran desa/kelurahan sudah menjadi keharusan. Maka pada tahun 1997, jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Enrekang telah bertambah dari 78 desa/kelurahan kondisi tahun 1996, menjadi 108 desa/kelurahan. Demikian halnya pada tingkat kecamatan, yang semula hanya 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan.

Pada pertengahan tahun 2003 terjadi pemekaran sehingga bertambah lagi sebanyak 3 desa menjadi 111 desa/kelurahan. Kemudian pada akhir tahun 2006 terjadi pemekaran desa dan kecamatan menjadi 11 kecamatan dan 112 desa/kelurahan. Terakhir pada tahun 2008 mekar kembali menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan. Dari 12 Kecamatan tersebut, kecamatan terluas adalah Kecamatan Maiwa yaitu 392,87 km² atau 22 persen dari luas Kabupaten Enrekang, sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Alla yaitu 34,66 km² atau 1,94 persen dari luas Kabupaten Enrekang.

Pegunungan Latimojong yang memanjang dari arah utara ke Selatan rata-rata ketinggian sekitar 3000 meter di atas permukaan laut, memagari kabupaten enrekang di sebelah timur sedang di sebelah barat membentang sungai Saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai Kabupaten Sidrap.

Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). KBE meliputi Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana, sedangkan KTE meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Luas KBE kurang lebih 659,03 Km² atau 36,90% dari Luas Kabupaten Enrekang sedangkan luas KTE kurang lebih 1.126,98 Km² atau 63,10% dari Luas wilayah Kabupaten Enrekang.

Dilihat dari aktifitas perekonomian, tampak ada perbedaan signifikan antara kedua wilayah tersebut. Pada umumnya aktifitas perdagangan dan industri berada pada wilayah KBE. Selain itu industri jasa seperti transportasi, telekomunikasi, hotel, restoran, perbankan, perdagangan industri pengotahan hash pertanian berpotensi dikembangkan di wilayah tersebut. Sedangkan KTE yang selama ini dianggap relatif tertinggal bila dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi, sangat memadai dari segi potensi SDA,

sehingga amat potensial untuk pengembangan pertanian dalam arti yang luas yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat.

Pemekaran dari lima kecamatan menjadi sembilan kecamatan di Kabupaten Enrekang menyebabkan akses penduduk terhadap pelayanan pemerintahan lebih mudah dicapai. Kondisi ini dipermudah oleh semakin dekatnya pusat pemerintahan kecamatan dari desa-desa bawahannya. Selain itu jumlah penduduk beserta aktifitasnya yang akan ditangani. Setiap wilayah kecamatan semakin berkurang. Pemekaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan roda pemerintahan sehingga akan memberikan efek positif terhadap akselerasi pembangunan di setiap wilayah.

Kawasan Timur Enrekang yang memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensinya memberi peluang untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan dan kehutanan. Adanya keterbatasan akses KTE terhadap Kawasan Barat Enrekang mengindikasikan perlunya kebijakan atau langkah langkah strategis yang memungkinkan kedua wilayah tersebut dapat bersinergi untuk menuju pencapaian visi dan misi daerah.

➤ **Visi dan Misi**

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian dan kebutuhan masyarakat maka diperlukan manajemen pembangunan pertanian yang modern dan meningkatkan keberpihakan kepada petani yang tinggi untuk memanfaatkan peluang yang ada dan didasari oleh

potensi dan kondisi sumberdaya pertanian Kabupaten Enrekang serta memperhatikan Visi Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 yaitu **“Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) Menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan”**, maka Visi Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang pada Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

Terwujudnya Pertanian Tangguh, Berdaya Saing Dan Berorientasi Agribisnis Menuju Enrekang, Maju, Aman Dan Sejahtera (Emas) Tahun 2018

Penjabaran makna dari visi tersebut adalah :

- **Terwujudnya pertanian tangguh** adalah pertanian yang dinamis serta mampu bertahan dalam berbagai kondisi melalui pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- **Berdaya Saing** Adalah hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah baik di dalam wilayah Kabupaten Enrekang maupun dalam pasar regional, nasional dan internasional dengan memperhatikan perwilayahan komoditi dan kelestarian lingkungan sehingga produksi dapat terlaksana secara berkelanjutan.
- **Berorientasi Agribisnis** Adalah pertanian yang dipandang sebagai suatu sistem dari hulu ke hilir yang terdiri dari produksi, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan aspek penunjang.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Enrekang, maka perlu dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya. Adapun misi Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang adalah :

- a. Meningkatkan Produksi, Produktivitas Komoditi Pertanian/Perkebunan
- b. Mendorong Optimalisasi penggunaan air, Sarana dan prasarana produksi untuk berproduksi
- c. Meningkatkan Kualitas Produksi komoditi unggulan Pertanian/Perkebunan
- d. Meningkatkan Kesejahteraan petani yang berorientasi Agribisnis
- e. Memantapkan system penyuluh pertanian yang terpadu dan berkelanjutan
- f. Mengembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluh pertanian
- g. Meningkatkan sistem pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang, maka Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang.

Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Kepala Bidang pada Dinas Pertanian diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pertanian dan Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan Dinas Pertanian ;
- b. Penyusunan rencana strategik Dinas Pertanian
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- d. Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pertanian

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan serta perencanaan Dinas Pertanian tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan dinas;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan dinas;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan lingkup dinas.

3. Kepala Bidang Tanaman Pangan

Kepala Bidang Tanaman Pangan, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem dibidang Tanaman Pangan, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
- c. Penyelenggaraan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan.

4. Kepala Bidang Hortikultura

Kepala Bidang Hortikultura, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem perbenihan, peningkatan produksi dan konservasi dan perlindungan hortikultura, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan Perbenihan dan Perlindungan hortikultura;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan produksi Hortikultura;

c. Penyelenggaraan kegiatan Sarana dan Prasarana tanaman hortikultura.

5. Kepala Bidang Perkebunan

Kepala Bidang Perkebunan, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem dibidang perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan;
- c. Penyelenggaraan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tanaman Perkebunan

6. Kepala Bidang Penyuluhan

Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan kebijakan, programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan Kelembagaan Petani
- b. Penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan Penyuluh
- c. Pelaksanaan kegiatan Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

7. Kelompok Jabatan fungsional

Untuk pelayanan teknis dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai keahlian dan kebutuhan.

8. Balai Penyuluhan Pertanian

➤ Struktur Organisasi Dinas

Struktur Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antara pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tanaman Pangan
 - a. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
 - b. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan
 - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan
4. Bidang Hortikultura
 - a. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura
 - b. Kepala Seksi Produksi Hortikultura
 - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura

5. Bidang Perkebunan

- a. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
- b. Kepala Seksi Produksi Perkebunan
- c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan

6. Bidang Penyuluhan

- a. Kepala Seksi Kelembagaan
- b. Kepala Seksi ketenagaan
- c. Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan

7. Kelompok Jabatan fungsional

Untuk pelayanan teknis dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai keahlian dan kebutuhan.

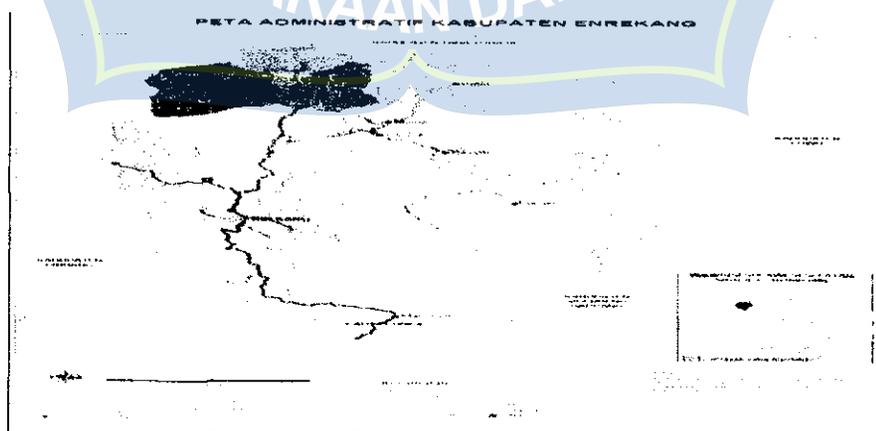
c. Kondisi Wilayah Kabupaten Enrekang.

Kabupaten Enrekang berada di jantung Jaserah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Pegunungan Latimojong yang memanjang dari Utara ke Selatan rata-rata ketinggian \pm 3.000 meter diatas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang disebelah timur sedang disebelah barat membentang Sungai Saddang dari utara ke selatan yang pengendalian airnya menentukan pengairan saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai ke Kabupaten Sidenreng Rappang. Kabupaten Enrekang terletak antara $3^{\circ} 14'36''$ LS dan $119^{\circ}40'53''$ BT. Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km. Batas-batas daerah Kabupaten Enrekang : Sebelah

Utara Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebelah Barat Kabupaten Pinrang, dan Sebelah Timur Kabupaten Luwu dan Sidenreng Rappang. Kabupaten Enrekang berada di daerah pegunungan, terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung menyambung, mengambil dari $\pm 85\%$ dari seluruh luas Kabupaten Enrekang yang luasnya $\pm 1.786,01$ Km atau 2,92 dari seluruh luas seluruh propinsi Sulawesi Selatan, secara administratif terbagi menjadi 9 kecamatan dan 111 Desa.

Iklim di Kabupaten Enrekang hampir sama dengan daerah lainnya di propinsi Sulawesi Selatan yaitu terbagi 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi/ berlangsung pada bulan November-Juli, sedangkan pada musim kemarau berlangsung pada bulan Agustus-Oktober. Jumlah hari hujan (HH) pada tahun 2001 139 dan curah hujan 3.970 mm, tahun 2002 jumlah HH 137 hari dan CH 1410 mm, tahun 2003 jumlah HH 82 CH 1925 mm.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Enrekang



Sumber : Buku Profil Kabupaten Enrekang

d. Kondisi Penduduk Kabupaten Enrekang

Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang untuk tahun 2008 adalah sebanyak 188.070 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Dengan kepadatan penduduk mencapai 105 jiwa/km².

Tabel 4.1 Penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018

| No. | Nama Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Total | Kepadatan Penduduk |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|--------------------|
| 1. | Maiwa | 11.655 | 11.657 | 23.312 | 59,3 |
| 2. | Bungin | 2.284 | 2.098 | 4.382 | 18,5 |
| 3. | Enrekang | 14.928 | 14.929 | 29.857 | 102,5 |
| 4. | Cendana | 4.269 | 4.420 | 8.689 | 95,5 |
| 5. | Baraka | 10.495 | 10.287 | 20.782 | 130,6 |
| 6. | Buntu Batu | 6.097 | 5.896 | 11.933 | 94,7 |
| 7. | Anggeraja | 11.866 | 11.850 | 23.716 | 189,2 |
| 8. | Malua | 4.275 | 4.322 | 8.597 | 213,0 |
| 9. | Alla | 10.107 | 10.046 | 20.153 | 581,4 |
| 10. | Curio | 7.248 | 7.094 | 14.342 | 80,3 |
| 11. | Masalle | 6.145 | 5.953 | 12.098 | 177,0 |
| 12. | Baroko | 5.184p | 4.965 | 10.149 | 247,1 |
| Kabupaten Enrekang | | 94.553 | 93.517 | 188.070 | 105,3 |

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2018 BPS Enrekang

Berdasarkan tabel Kecamatan Enrekang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak jika di bandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebesar 29.857 jiwa. Hal ini dimungkinkan karena kecamatan ini berada di ibu kota Kabupaten dengan penduduk yang heterogen. Adapun kecamatan dengan penduduk yang paling sedikit yaitu kecamatan Bungin dengan jumlah penduduk sebesar 4.382 jiwa dan merupakan kecamatan yang baru dimekarkan.

B. Inventarisasi Dan Data Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang

Untuk meningkatkan hasil produksi kopi arabika pemerintah menginventarisasikan bantuan kepada kelompok tani To'Beang seperti yang digambarkan pada table dibawah ini.

Tabel 4.2 Inventarisasi Data

| Nama Kelompok | Nama Alat | Jumlah (unit) | Kondisi alat & Mesin | |
|---------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| | | | Baik | Rusak |
| To'Beang | Para-para sungkup | 20 | 20 | - |
| | Terpal | 30 | 20 | 10 |
| | Alat ukur kadar air | 1 | 1 | - |
| | Pulper | 1 | 1 | - |
| | Hulter | 1 | 1 | - |
| | | | | |

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang

Adapun beberapa orang yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) di dalam menjalankan kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani dapat di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Stakeholder

| No | Stakeholder | Tugas | Bentuk kerja sama |
|----|---|-------------|--|
| 1 | Pemerintah Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan | Sosialisasi | Memberikan bantuan mesin |
| 2 | Kelompok Tani To'Beang | Pelaksana | Memproduksi kopi menjadi kopi bubuk |

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kolaborasi Dalam Produksi Kopi Arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang

Untuk hasil produksi kopi akan baik jika dikelola secara bersama oleh karena dalam meningkatkan hasil produksi kopi perlu melibatkan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, lembaga swasta serta dukungan dari masyarakat. Untuk meningkatkan hasil produksi kopi pemerintah menginisiasi sebuah lembaga untuk terlibat dalam meningkatkan hasil produksi kopi arabika dalam hal ini Kelompok Tani To,Beang inilah yang diidentifikasi sebagai bentuk kolaborasi.

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana kolaborasi yang dilakukan dalam produksi. Bab ini juga akan menjelaskan dengan memakai tiga proses kolaborasi Balogh dkk. (2012). a) Dinamika Kolaborasi, b) Tindakan-tindakan Kolaborasi, c) Dampak dan Adaptasi pada proses kolaborasi. Tiga proses

inihlah yang menjadi dasar untuk menganalisis pembahasan pada bab ini dan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi adalah penggerak penting pada kolaborasi. dimana dalam melaksanakan proses kolaborasi yang baik terdapat dinamika kolaborasi didalamnya dan didalam dinamika kolaborasi terdapat motivasi bersama dan kapasitas untuk melakukan tindakan secara bersama sejalan dengan teori yang telah di kemukakan oleh Balogh dkk yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Motivasi Bersama

Motivasi bersama adalah sebuah dorongan atau sebuah kehendak yang dilakukan secara bersama-sama dalam menanggapi tujuan tertentu. Dalam produksi kopi arabika seluruh pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi memiliki tujuan yang sama dan hendak dicapai. Dalam motivasi bersama untuk mencapai tujuan dapat kita lihat sebagai berikut ini:

1) Kepercayaan Bersama

Dalam sebuah kolaborasi kepercayaan bersama sangat penting karena proses peningkatan tidak hanya melibatkan satu pihak saja akan tetapi melibatkan pihak lain sehingga dalam peningkatannya kepercayaan kepada semua pihak harus ada untuk memperlancar kolaborasi yang dilakukan dalam peningkatan hasil produksi kopi arabika. Kepercayaan bersama sangat dibutuhkan oleh setiap lembaga

yang memiliki kepentingan untuk penunjang kelancaran proses kolaborasi yang baik seperti hasil wawancara dengan salah satu informan kabid kelembagaan pertanian sebagai berikut:

dalam pengelolaan kepercayaan itu sangat penting karena kepercayaan bersama merupakan hal utama dalam melakukan kolaborasi terhadap siapapun itu apalagi karena kita ini melakukan kerjasama dengan pihak kelompok tani, artinya mereka harus tahu bagaimana produksi itu mulai dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah maksudnya itu bagaimana memulai sebuah kolaborasi produksi kalau kita tidak saling percaya sama semua hal dan pastinya harus transparan (hasil wawancara dengan "TT" pada tanggal 14 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kepercayaan dengan pihak lain sangat penting dalam melakukan kolaborasi karena tanpa adanya kepercayaan antara pihak yang melakukan kolaborasi maka kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan ketua dari Kelompok Tani To'Beang sebagai berikut:

iya memang kepercayaan dalam sebuah kerjasama itu harus ada, apalagi dengan kami berkolaborasi dengan pihakj pemerintahan dinas pertanian kami cukup transparan misal setiap ada kegiatan-kegiatan ada konfirmasi serta penyampaian atau kita bertanya tentang produksi apa yang baik untuk dilakukan. (hasil wawancara dengan "R" pada tanggal 5 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kolaborasi produksi kopi arabika kepercayaan itu penting akan tetapi bila pihak yang melakukan kolaborasi dalam hal ini Pemerintah dan

Kelompok Tani To,Beang tidak saling mempercayai lagi maka kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai kepercayaan bersama dapat diketahui bahwa dalam proses kolaborasi kepercayaan itu sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam peningkatan hasil produksi kopi arabika. Karena kolaborasi tanpa adanya rasa saling percaya satu sama lain antara pihak yang bekerjasama maka proses kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik. Kepercayaan bersama antara pihak dalam peningkatan produksi kopi arabika belum baik karena seiring berjalannya waktu kepercayaan antara kedua pihak memudar dikarenakan kurangnya pembagian informasi serta jarangya diskusi sehingga proses kolaborasi dalam meningkatkan hasil produksi kopi arabika tidak lagi berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Balogh dkk yang digunakan bahwa dalam sebuah kolaborasi kepercayaan bersama sangat penting karena proses peningkatan tidak hanya melibatkan satu pihak saja akan tetapi melibatkan pihak lain sehingga dalam pengelolaannya kepercayaan kepada semua pihak harus ada untuk memperlancar kolaborasi yang dilakukan.

2) Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama antara semua pihak yang bekerja sama ialah dengan saling mengerti dan menghargai perbedaan dalam melakukan kolaborasi peningkatan hasil produksi kopi arabika. Pemahaman bersama pada kolaborasi sering dipengaruhi oleh sikap percaya yang telah dibentuk

oleh kolaborasi. Hasil wawancara dengan salah satu informan kapid perkebunan sebagai berikut:

membangun pemahaman bersama itu memang dibutuhkan agar kerjasama ini bisa berjalan dengan baik, kami dari pihak pemerintahan dinas pertanian hal yang kami lakukan untuk membangun pemahaman dengan selalu melakukan komunikasi dengan baik dengan pihak kelompok tani serta mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang pernah dijalankan juga menghargai tugas masing-masing agar kolaborasi ini selalu berjalan dengan baik sesuai apa yg telah menjadi tujuan bersama. (hasil wawancara dengan "TT" pada tanggal 14 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam membangun pemahaman bersama dengan pihak kelompok tani hal yang dilakukan dengan melakukan komunikasi serta mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan juga menghargai tugas masing-masing. Hasil wawancara dengan salah satu informan ketua Kelompok Tani To,Beang sebagai berikut:

kami selalu berupaya untuk membangun pemahaman bersama dengan pihak pemerintahan dinas pertanian dengan saling bekerja sama dalam produksi kopi arabika dan saling menghargai tugas masing-masing. Dengan kami berkomunikasi dengana baik kami mampu bertukar pikiran mengenai hal apa yang ingin dilakukan selanjutnya. (hasil wawancara dengan "R" pada tanggal 5 Agustus 2020).

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa untuk membangun pemahaman bersama dengan pihak pemerintahan dinas pertanian dengan saling bekerja sama dan menghargai tugas masing-masing dan selalu menjalin komunikasi dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman bersama dapat diketahui bahwa dalam berkolaborasi produksi kopi arabika pihak pemerintahan dinas pertanian berupaya membangun pemahaman bersama dengan pihak kelompok tani untuk menjaga hubungan dengan baik serta kepercayaan antara pihak yang berkolaborasi dengan melakukan komunikasi dan evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan kekompatan yang dilakukan dari pemerintahan dinas pertanian maupun dari kelompok tani membuat komunikasi antara keduanya berjalan dengan lancar sehingga kolaborasi dalam produksi kopi arabika berjalan dengan baik. Dengan demikian hal ini sudah sejalan dengan teori dari Balogh dkk yang mengatakan bahwa pemahaman bersama antara semua pihak yang bekerjasama ialah dengan saling mengerti dan menghargai perbedaan.

b. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas melakukan tindakan bersama dalam peningkatan hasil produksi kopi arabika adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kerjasama antara pihak yang terlibat dalam peningkatan hasil produksi kopi arabika. Setiap pihak memiliki kapasitasnya masing-masing dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kapasitas melakukan tindakan bersama bersama untuk mencapai tujuan bersama dapat kita lihat sebagai berikut ini:

1) Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dibutuhkan oleh pihak untuk ikut berpartisipasi dalam proses kolaborasi. pengetahuan adalah informasi yang

telah di pahami oleh actor, sehingga akan berguna bagi mereka dalam melakukan sebuah kolaborasi dengan banyak pihak. Hasil wawancara dengan salah satu informan Dinas Pertanian sebagai berikut:

pada saat kami melakukan kolaborasi ini dalam peningkatan hasil produksi kopi kami cukup memberikan pelatihan-pelatihan , arahan-arahan dan informasi menyangkut dalam produksi kopi arabika. (hasil wawancara dengan “MA” pada tanggal 14 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan hasil produksi kopi pemberian arahan dan informasi berupa tugas dan informasi mengenai perkembangan produksi kopi arabika dilakukan untuk kelompok tani yang di lokasinya masing-masing, hal ini di perkuat oleh salah satu informan pada wawancara kabid perkebunan sebagai berikut:

tentu pengetahuan itu penting untuk kolaborasi untuk mengembangkan SDM sebagai penggerak di daerahnya itu kami utamakan Kelompok Tani yang aktif di daerahnya masing-masing. (hasil wawancara dengan “TT” pada tanggal 15 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pemberian informasi dan arahan dalam peningkatan hasil produksi kopi arabika lebih di utamakan untuk kelompok tani yang aktif. Yang dikatakan oleh salah satu informan Ketua Kelompok Tani To'Beang sebagai berikut:

dalam produksi kopi arabika kami mendapatkan bantuan dari pihak dinas pertanian yang bisa memberikan kami informasi dan arahan dalam pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana cara menggunakan alat yang telah diberikan karena kami sendiri belum faham menggunakannya dan juga bagaimana cara dalam

memproduksi kopi dengan baik. (hasil wawancara dengan “R” pada tanggal 5 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang pihak pemerintahan dinas pertanian memberikan informasi melalui pelatihan-pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas tentang pengetahuan dapat disimpulkan bahwa dalam kolaborasi produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang pemberian informasi mengenai tugas serta arahan-arahan mengenai apa yang harus dilakukan agar proses kolaborasi bisa berjalan dengan baik sudah maksimal. Hal ini sudah sejalan dengan teori yang digunakan dari Balogh dkk bahwa pengetahuan adalah informasi yang dibutuhkan oleh pihak untuk ikut berpartisipasi dalam proses kolaborasi. pengetahuan adalah informasi yang telah dipahami oleh actor, sehingga akan berguna bagi mereka dalam melakukan sebuah kolaborasi dengan banyak pihak.

2. Tindakan-tindakan Kolaborasi

Tindakan-tindakan kolaborasi pada prakteknya sangatlah bermacam-macam apapun bentuk yang dilakukan baik dalam wujud kegiatan sosialisasi maupun bimtek yang dilakukan oleh pihak yang berkolaborasi. sejalan dengan teori yang telah di kemukakan oleh Balogh dkk bahwa tindakan-tindakan kolaborasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam proses kolaborasi seperti tindakan memajukan proses

kolaborasi dan kegiatan dilapangan seperti yang telah dijabarkan sebagai berikut:

a. Memfasilitasi

Memfasilitasi pada proses kolaborasi merupakan cara untuk mempermudah dan melancarkan pelaksanaan kolaborasi. Memfasilitasi adalah sebuah kegiatan yang dapat menjelaskan suatu pemahaman, keputusan serta tindakan yang dilakukan secara individual atau bersama dengan orang lain dengan tujuan mempermudah tugas yang dijalankan. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu informan kepala dinas pertanian dalam wawancara sebagai berikut:

pihak kami bisa memfasilitasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran bersama dalam meningkatkan hasil produksi kopi, kami juga melakukan bimtek kepada kelompok tani. Pemerintahan dinas pertanian juga memberikan fasilitas berupa alat-alat apa yang dibutuhkan dalam melakukan produksi kopi. (hasil wawancara dengan "MA" pada tanggal 14 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa sosialisasi mengenai peran dan kontribusi diberikan kepada masyarakat agar kesadaran mereka dapat bertumbuh, serta memberikan bimtek kepada kelompok tani agar anggotanya dapat berkompeten. Hal itu selalu dilakukan agar tujuan kita bersama dalam berkolaborasi berjalan dengan lancar, hal yang di ungkapkan oleh salah satu informan Ketua Kelompok Tani To'Bang pada wawancara berikut ini:

begini dek dalam memfasilitasi minimal kami menyumbang tenaga kalau ada kegiatan, juga mengirim anggota untuk

menghadiri setiap pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka yang nantinya memberikan kepada masyarakat. (hasil wawancara dengan “R” pada tanggal 5 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam memfasilitasi kolaborasi produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko dengan menyumbangkan tenaga serta mengirim anggota untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kemampuan mereka dan nantinya memberikan edukasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat di ambil kesimpulan bahwa mengenai peran dalam memfasilitasi kolaborasi produksi kopi arabika guna memperlancar dan mempermudah proses kolaborasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi untuk meningkatkan hasil produksi kopi arabika. Hal ini sudah dilakukan secara maksimal karena keduanya saling melengkapi dari segi pengetahuan. Hal ini sudah sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Balogh dkk bahwa memfasilitasi dalam proses kolaborasi merupakan cara untuk mempermudah dan melancarkan pelaksanaan kolaborasi. Memfasilitasi adalah sebuah kegiatan yang dapat menjelaskan suatu pemahaman, keputusan serta tindakan yang dilakukan secara individual atau bersama dengan orang lain dengan tujuan mempermudah tugas yang dijalankan supaya proses kerjasama itu berjalan dengan maksimal.

b. Memajukan Proses Kolaborasi

Dalam upaya memajukan proses kolaborasi dengan merangkul seluruh pihak yang berperan dalam hal produksi kopi dan menjaga kerjasama yang telah dijalani agar keadaan menjadi lebih baik dan membangun proses kolaborasi dalam produksi kopi arabika bisa lebih berkembang lagi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu informan kabid perkebunan dalam wawancara sebagai berikut:

kami berusaha untuk menjalin komunikasi dengan melakukan pertemuan dalam upaya memajukan kolaborasi. Saat ini kami akui belum efektif karena komunikasi kami dengan pihak kelompok tani To'Beang tidak berjalan dengan baik dan kami jarang melakukan pertemuan. hasil wawancara dengan "TT" pada tanggal 14 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya dalam memajukan proses kolaborasi seperti merangkul dan menjaga kerjasama dalam meningkatkan hasil produksi kopi arabika belum efektif sehingga kerjasama diantara mereka tidak berjalan dengan baik. hal yang di ungkapkan oleh salah satu informan anggota Kelompok Tani To'Beang pada wawancara berikut ini:

upaya kami adalah berusaha terbuka untuk bertukar pendapat ketika ada komunikasi kepada kami dari tim penyuluh pemerintahan dinas pertanian dan berusaha memahami apa yang diarahkan kepada kami. Kami juga selalu menjalin komunikasi dengan baik agar kolaborasi kami dalam produksi kopi arabika sekarang sudah bisa dikatakan cukup baik. (hasil wawancara dengan "SM" pada tanggal 10 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam memajukan proses kolaborasi upaya yang dilakukan adalah berusaha terbuka satu sama lain seperti memberitahu rencana yang akan dilakukan dan ingin dicapai serta selalu menjalin komunikasi dengan baik sehingga upaya ini sudah efektif dalam memajukan proses kolaborasi produksi kopi arabika.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai memajukan proses kolaborasi dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pihak yang bekerjasama untuk memajukan kolaborasi dengan berusaha saling terbuka seperti memberitahu rencana yang akan dilakukan dan ingin dicapai serta mengadakan pertemuan. Kolaborasi ini bisa dinyatakan sudah efektif karena komunikasi antara pihak yang bekerjasama sudah terjalin dengan baik dan juga kesadaran masyarakat sudah ada sehingga upaya untuk memajukan kolaborasi dalam produksi kopi arabika sudah efektif.

3. Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi

Dalam proses penelitian yang dilakukan akhirnya akan memberi dampak. Dari berbagai dampak tentu akan menghasilkan *feedback* atau umpan balik, dan akan diadaptasi oleh kolaborasi. adaptasi yang dimaksud ialah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing pihak yang terlibat. Hal yang diungkapkan dari hasil wawancara dengan salah satu informan kabid perkebunan kelembagaan pertanian sebagai berikut:

dalam produksi kopi itu sulit ketika kita sendiri yang melakukannya karena pada dasarnya banyak hal yang harus dilakukan dan dengan sumber daya yang kurang maka kita harus melakukan kolaborasi dengan pihak yang lain yang disini adalah kelompok tani dan dampaknya kesadaran masyarakat mulai agak tumbuh sehingga kolaborasi ini berjalan dengan baik karena dari pihak kelompok tani yang sudah aktif dalam berpartisipasi memberikan kelancaran untuk kami melakukan setiap kegiatan yang kami lakukan sehingga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. (hasil wawancara dengan “TT” pada tanggal 14 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam produksi kopi arabika sudah memberikan dampak seperti pengetahuan masyarakat sudah ada dilihat dari kebiasaan sudah bisa melakukan kegiatannya tanpa di damping langsung oleh pihak Dinas Pertanian namun dampaknya ini bisa dikatakan sudah terwujud seperti dalam produksi kopi arabika sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal yang disampaikan oleh ketua kelompok tani To'Beang dalam wawancara berikut:

dalam produksi kopi arabika yang tidak dapat dilakukan secara sendiri, maka kami melibatkan diri dengan melakukan kolaborasi dengan pihak pemerintahan dinas pertanian dalam produksi kopi arabika. Dan dalam kolaborasi ini kami rasa sudah memberikan dampak yang sudah baik bagi kami dan juga masyarakat petani karena bisa kita lihat sekarang petani kopi sudah terlalu bersemangat dalam pekerjaannya. (hasil wawancara dengan “R” pada tanggal 5 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi yang dilakukan pada produksi kopi arabika memberikan

dampak yaitu mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat dan membuka peluang lapangan kerja dan peluang pendapatan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh serta membuka peluang pendapatan kepada masyarakat.

D. Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Mengacu pada konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan semua sector baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mengelola, menata dan mengatur semua urusan bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Kolaborasi adalah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki sebuah kepentingan terhadap masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama untuk mencapai tujuann yang tidak dapat dicapai jika dilakukan sendiri-sendiri.

Proses kolaborasi menunjukkan sebuah system yang dimana kolaborasi mewakili model yang mendominasi untuk perilaku, pengambilan keputusan dan aktivitas. Dalam proses kolaborasi ini memiliki tiga variable. Dimana dalam proses kolaborasi yang perlu diperhatikan antara lain yaitu

dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi serta dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi (Balogh, dkk 2012).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan kelompok tani sudah berjalan secara efektif, sehingga dalam berkolaborasi produksi kopi arabika pihak pemerintahan dinas pertanian dengan pihak kelompok tani berupaya untuk menjaga hubungan dengan baik serta kepercayaan antara pihak yang berkolaborasi dengan melakukan komunikasi dan evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan kekompackan yang dilakukan dari pemerintahan dinas pertanian maupun dari kelompok tani membuat komunikasi antara keduanya berjalan dengan lancar sehingga kolaborasi dalam produksi kopi arabika berjalan dengan baik.

Tindakan-tindakan kolaborasi pada prakteknya sangatlah bermacam-macam apapun bentuk yang dilakukan baik dalam wujud kegiatan sosialisasi maupun bimtek yang dilakukan oleh pihak yang berkolaborasi. sejalan dengan teori yang telah di kemukakan oleh Balogh dkk bahwa tindakan-tindakan kolaborasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam proses kolaborasi seperti tindakan memajukan proses kolaborasi dan kegiatan dilapangan seperti yang telah dilakukan mengenai memajukan proses kolaborasi bahwa upaya yang dilakukan pihak yang bekerjasama untuk memajukan kolaborasi dengan berusaha saling terbuka seperti memberitahu rencana yang akan dilakukan dan ingin dicapai serta mengadakan pertemuan.

Kolaborasi ini bisa dinyatakan sudah efektif karena komunikasi antara pihak yang bekerjasama sudah terjalin dengan baik dan juga kesadaran masyarakat sudah ada sehingga upaya untuk memajukan kolaborasi dalam produksi kopi arabika sudah efektif.

Dalam proses penelitian yang dilakukan akhirnya akan memberi dampak. Dari berbagai dampak tentu akan menghasilkan *feedback* atau umpan balik, dan akan diadaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud ialah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing pihak yang terlibat seperti yang dapat kita lihat bahwa mengenai dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh serta membuka peluang pendapatan kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya bahwa focus penelitian pada kolaborasi dalam produksi kopi arabika di kecamatan baroko kabupaten enrekang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika dalam produksi kopi arabika di kecamatan baroko kabupaten enrekang sudah terlaksana karena melibatkan pihak kelompok tani dan sudah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Balogh dkk bahwa dinamika kolaborasi adalah penggerak penting pada kolaborasi, dimana dalam melaksanakan proses kolaborasi yang baik terdapat dinamika kolaborasi didalamnya dan didalam dinamika kolaborasi terdapat motivasi bersama dan kapasitas untuk melakukan tindakan secara bersama.
2. Tindakan-tindakan kolaborasi dalam produksi kopi arabika di kecamatan baroko kabupaten enrekang dalam kolaborasi produksi kopi arabika sudah maksimal sehingga pada setiap kegiatan pelatihan dan sosialisasi guna meningkatkan kemampuan pihak yang berkolaborasi sudah berjalan dengan lancar.
3. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi dalam produksi kopi arabika di kecamatan baroko kabupaten enrekang sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh serta

membuka lapangan pekerjaan dan peluang pendapatan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok tani dalam produksi kopi arabika di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, oleh karena itu menyarankan:

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah daerah baik itu Dinas Pertanian dan penyuluh perkebunan agar lebih banyak terjun lagi kelapangan untuk mendampingi atau berkunjung kelokasi.
2. Diharapkan kepada anggota kelompok tani agar memberdayakan dirinya dalam kelembagaan kelompok tani agar aspirasi mereka bisa tersampaikan, kapasitas mereka bisa berkembang istilahnya pengetahuan yang disampaikan kepada mereka akan mereka rampung dan diaplikasikan pada diri mereka sendiri.

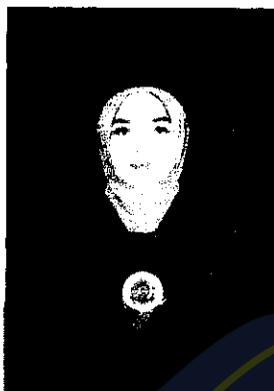
DAFTAR PUSTAKA

- AKI. 2013. *Luas dan Areal Produksi*. Internet. [Artikel on-line]. <http://www.aekiaice.org/pagr/areal-dan-produksi/id>. Diunduh tanggal 20 januari 2021.
- Ansell, C. (2014). *Pragmatist Democracy: Evolutionary Learning as Public Philosophy*. New York: Okford University Press, Inc.
- Ansell, C. & A. G. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 NO.4.
- Balogh, Kirk, Nabatchi, Tina, S. (2012). An Interative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administrasion Research and Theory*.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik, Inklusif, dan Kolaborasi*. Yogyakarta: Gajamada University Perss.
- Fairuza, Mia. 2017. *Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Parawisata (Studi kasus tentang kerajinan reyong dan pertunjukan reyong gi Kabupaten Ponorogo)*. Jurnal program studi megister Administrasi public program pasca sarjana Universitas sebelas maret.
- Herawati, L. 2015. *Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat IV*. Jakarta
- Fendt, T. C. (2010). *Introducing Electronik SupllyChain Collaboration in China: Efidence from Manufacturing Industries*. Berlin. Universitatsverlag der Technischen Universitat Berlin.
- Hermanto, R. (2007). Rancangan Kelembagaan Tani Dalam Implementasi Prima Tani Di Sumatera Selatan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(2).
- Moerdiono. (1992). *Birokrasi dan Administrasi Pembangunan: Beberapa Pemikiran Pemecahan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nahrudin, Z. (2018). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan*. INA-Rxiv, Open Science Framework.
- Ndraha, T. (1997). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pramusinti, Agus, E. A. P. (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: grava media.
- Purwanti, N. D. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintnahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontenporer)*. Yogyakarta, Center for Policy & Management Studiens, FISIPOL UGM.
- Sabaruddin, A. (2015). *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik, Teori,*

Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Saptana, W. D. A. S. (2004). *Integrasi Kelembagaan Forum KASS dan Program Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Bisnis Sayuran Sumatera*. Analisis Kebijakan Pertanian. 2 (3), 257-276.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabet: Bandung.
- Sunarno, Siswanto, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjanra, W, R. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya.
- Wanna, J. (2008). *Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers, and outcomes, dalam O'Flynn, Jannie & Wanna, Jhon. Collaborative Governance: a new era of public policy in Australia?* Canberra: Australian National University E Press.
- Zaenuri, M., Zauhar, S., Wijaya, A. F., & Java, E. (n.d.). Tourism Affair Management With Collaborative Governance Approach: Tourism Affairs Management Studies in Sleman Regency ,2(6), 1-14. <http://www.ijmas.org/2-6/IJMAS-2903-2015.pdf>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

RIWAYAT HIDUP



Salma. Lahir pada tanggal 14 Mei 1997, di Desa Dulang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke tujuh dari pasangan Iding dan Usmi Penulis pertama kali masuk pendidikan Formal di SDN 67 Dulang pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2010.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Baraka dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat di SLTP, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Baraka Kabupaten Enrekang tamat pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).